BAB II
PERAN KIAI DAN KEMANDIRIAN EKONOMI

A. Peran Kiai

1. Pengertian Peran

Pengertian Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemian sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyaakat.[27]

Soekanto, berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.[28] Setiap orang juga mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Hubungan-hubungan sosial yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur status yang menunjukan tempat individu pada organisasi kemasyarakatan. Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu

[27] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
[28] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peranan.

Sedangkan Narwoko dan Suyanto, menyatakan bahwa suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:[29]

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam pengertiannya, peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.[30] Peran erat kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan. Soekanto melanjutkan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peran.[31]

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya memiliki kesamaan yang saling berkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak

[29] Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*(Jakarta: Kencana, 2006),159.
[30] Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* ,(Jakarta: Modern English Press, 1991), 1132.
[31] Soekanto, *Sosiologi,213.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai peran di masyarakat secara langsung.[32]

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat atau orang lain.

Di samping itu, peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Sebagai pola perlakuan, peran memiliki beberapa unsur, antara lain:[33]

a. Peran ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan status tertentu.
b. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh seseorang dalam kehidupan nyata. Peranana yang dilakukan dalam kehidupan nyata mungkin saja berbeda dengan peranan ideal, yang ideal hanya berada dalam fikiran dan belum terealisasi dalam kehidupan yang sebenarnya.

Masih terkait dengan peran, Suhardono menjelaskan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: *pertama,* penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan

[32] Ralph Linton, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 268.
[33] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktrur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.[34]

Kedudukan sendiri sering diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan karena biasanya dia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan yang beragam.

Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat secara umum, biasanya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu:

a. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak kiai biasanya secara otomatis akan memperoleh penghormatan yang istimewa.

Achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Oleh karena itu,

[34] Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang menginginkannya, bergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya.[35]

2. Pengertian Kiai

Kiai adalah sebutan bagi Alim ulama (cerdik, pandai dalam agama Islam).[36]Arti lain, kiai adalah sentra utama lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama (pondok) dan masjid sebagai pusat lembaganya. [37] Menurut asal usulnya, perkataan kiai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

a. Sebutan gelar kehormatan bagi barang-barang dianggap keramat; umpamanya, kiai Garuda Kencana dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta.
b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain kiai, ia juga sering disebut alim (orang yang dalam pengetahuan Islamnya).[38]

Istilah kiai memiliki pengertian yang plural. Kata kiai bisa berarti: sebutan bagi alim ulama (cerdik pandai dalam agama Islam); Alim ulama; Sebutan bagi guru ilmu gaib (dukun dan sebagainya); Kepala distrik (di

[35] Ibid,
[36] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1994), 499.
[37] Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai (Kasus Pondok Pesantren Tebuireng)* (Malang: Kalimasada Press, 1993), 3.
[38] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3S, 1994), hal. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalamantan Selatan);Sebutan yang mengawali nama benda yang dianggap bertuah (senjata, gamelan, dan sebagainya) dan Sebutan samaran untuk harimau (jika orang melewati hutan).[39]

Gelar kiai tidak diusahakan melalui jalur-jalur formal sebagai sarjana misalnya, melainkan datang dari masyarakat yang secara tulus memberikannya tanpa intervensi pengaruh-pengaruh pihak luar. Kehadiran gelar ini akibat kelebihan-kelebihan ilmu dan amal yang tidak dimiliki lazimnya orang dan kebanyakan didukung pesantren yang dipimpinnya.[40]

3. Peranan Kepemimpinan Kiai

Menurut Wuradji, berbicara mengenai fungsi dan peran pemimpin, ada sejumlah peran yang harus dilakukan pemimpin, di antaranya adalah: [41]

a. Pemimpin berperan sebagai koordinator terhadap kegiatan kelompok (*coordinator*)
b. Pemimpin berperan sebagai perencana kegiatan (*planner*)
c. Pemimpin berperan sebagai pengambil keputusan (*policy maker*) baik karena atas pertimbangannya sendiri, ataupun setelah mempertimbangkan pendapat kelompoknya.
d. Pemimpin berperan sebagai tenaga ahli (*expert*) yang secara aktual berperan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi kelompoknya.

---

[39] Depag RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, Edisi II, 1991), 499.
[40] Ali Maschan Moesa, *Agama dan Demokrasi; Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, (Surabaya: Pustaka Da'i Muda, 2002), 28 .
[41] Wuradji, *The Educational Leadership (Kepemimpinan Transformasional)*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), hal. 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemimpin berperan sebagai wakil kelompok dalam urusan luar (*external group representative*) yang bertugas mewakili kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain.

f. Pemimpin berperan sebagai pemberi imbalan dan sanksi (*as purpeyor of rewards and punishment*).

g. Pemimpin berperan sebagai atribasi dan mediator (*arbitrator and mediator*), khususnya dalam menyelesaikan konflik internal ataupun perbedaan pendapat di antara para anggotanya.

h. Pemimpin berperan sebagai teladan (*example*) yang dijadikan model perilaku yang dapat diteladani pengikutnya)

i. Pemimpin berperan sebagai simbol dan identitas kelompoknya (*as a symbol of the group*)

j. Pemimpin berperan sebagai pembenar (*scapegoat*) yang akan mengkritisi terhadap sesuatu yang dianggap tidak benar.

4. Model Kepemimpinan Kiai

Menurut beberapa literatur yang ada, kepemimpinan kiai dapat dibagi menjadi dua, yakni model kepemimpinan individual dan kepemimpinan kolektif. Tentu, keduanya mempunyai ciri dan gaya yang berbeda yang sedikit banyak juga mempunyai perjalanan kiai menjadi pemimpinan dalam lembaga yang dipimpinnya, yakni pesantren.

a. Model kepemimpinan individual

Kepemimpinan individual kiai inilah yang sesungguhnya mewarnai pola relasi di kalangan pesantren dan telah berlangsung dalam rentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu yang lama, sejak pesantren berdiri pertama hingga sekarang dalam kebanyakan kasus. Lantaran kepemimpinan individual kiai itu pula terkesan bahwa pesantren adalah milik pribadi kiai.[42]

Model kepemimpinan tersebut memengaruhi eksistensi pesantren. Bahkan belakangan ada pesantren yang dilanda masalah kepemimpinan ketika ditinggal oleh kiai pendirinya. Hal itu disebabkan tidak adanya anak kiai yang mampu meneruskan kepemimpinan pesantren yang ditinggalkan ayahnya baik dari segi penguasaan ilmu keislaman maupun pengelolaan kelembagaan. Karena itu, kesinambungan pesantren menjadi terancam.[43]

b. Model kepemimpinan Kolektif

Kepemimpinan kolektif dapat diartikan sebagai proses kepemimpinan kolaborasi yang saling menguntungkan, yang memungkinkan seluruh elemen sebuah institusi turut ambil bagian dalam membangun sebuah kesepakatan yang mengakomodasi tujuan semua. Kolaborasi dimaksud bukan hanya berarti "setiap orang" dapat menyelesaikan tugasnya, melainkan yang terpenting adalah semua dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling mendukung (*al-jam'iyah al murassalah* atau *collegiality and supportiveness*).[44]

Model kepemimpinan kolektif atau yayasan tersebut menjadi solusi strategis. Beban kiai menjadi lebih ringan karena ditangani bersama sesuai

---

[42] Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 40.
[43] M. Dawam Rahardjo, *Pergumulan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, (Jakarta: P3M, 1985), 114
[44] Amin Hadari dan M. Ishom El Saha, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tugas masing-masing. Kiai juga tidak terlalu menanggung beban moral tentang kelanjutan pesantren di masa depan. Sebagai pesantren yang pernah menjadi paling berpengaruh se-Jawa-Madura, pada 1984 Pesantren Tebuireng mendirikan Yayasan Hasyim Asy'ari yang mengelola seluruh mekanisme pesantren secara kolektif.[45] Namun demikian, tidak semua kiai pesantren merespons positif solusi tersebut. Mereka lebih mampu mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul dibanding kelebihannya.

Keberadaan yayasan dipahami sebagai upaya menggoyahkan kepemimpinan kiai. Padahal, keberadaan yayasan justru ingin meringankan beban baik akademik maupun moral. Kecenderungan untuk membentuk yayasan ternyata hanya diminati pesantren-pesantren yang tergolong modern, belum berhasil memikat pesantren tradisional. Kiai pesantren tradisional cenderung lebih otoriter daripada kiai pesantren modern.[46]

Perubahan dan kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif akan sangat berpengaruh terhadap hubungan pesantren dan masyarakat. Semula hubungan semula bersifat patron klien, yakni seorang kiai dengan karisma besar berhubungan dengan masyarakat luas yang menghormatinya. Sekarang hubungan semacam itu semakin menipis.

[45] Imron Arifin, *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*, (Malang: Kalimasada Press, 1993), 104.
[46] Mujamil Qomar, *Pesantren*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Justru yang berkembang adalah hubungan kelembagaan antara pesantren dengan masyarakat.[47]

Konsekuensi dan pelembagaan yayasan itu adalah perubahan otoritas kiai yang semula bersifat mutlak menjadi tidak mutlak lagi, melainkan bersifat kolektif ditangani bersama menurut pembagian tugas masing-masing individu, kendati peran kiai masih dominan. Ketentuan yang menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan merupakan konsensus semua pihak. Yayasan memiliki peran yang cukup besar dalam pembagian tugas yang terkait dengan kelangsungan pendidikan pesantren.[48]

Menurut Stephen P. Robbins sebagaimana yang dikutip oleh Mardiyah, bahwa setidaknya ada lima model kepemimpinan yang dikembangkan berdasarkan hasil studi mengenai *leadership skills*, di antaranya adalah:[49]

a. *Traits model of leadership,* yang lebih banyak meneliti tentang watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, status social, dan lain-lain.
b. *Model of situational leadership,* yang lebih focus pada faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan.
c. *Model of effective leaders.* Model ini mendukung asumsi bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menangani aspek organisasi dan manusianya sekaligus.

---

[47] Abdul Rahman Shaleh, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren,* (Jakarta: Depag RI, 1982), 7.
[48] Kasful Anwar US, "Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi terhadap Pondok Pesantren di Kota Jambi", *Kontekstualita,* Vol. 25, No. 2, (2010), 232.
[49] Mardiyah, *Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi,* 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Contingency model.* Sekalipun dianggap lebih sempurna dibandingkan model-model sebelumnya dalam memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi, namun belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku pemimpin, dan variabel situasional.

e. *Model of transformasional leadership.* Model ini dinilai lebih mampu menangkap fenomena kepemimpinan disbanding model-model sebelumnya. Bahkan banyak peneliti dan praktisi manajemen sepakat bahwa model ini merupakan konsep kepemimpinan yang terbaik dalam menguraikan karakteristik pemimpin, dan konsep ini dinilai telah mengintegrasikan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya.

Dalam kaitanya dengan pembahasan peran kiai di sebuah pondok pesantren banyak fakta sejarah telah membuktikan bahwa kiai merupakan sosok pemimpin masyarakat luas yang banyak memberikan kontribusi dalam menata dan memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena sejak awal kelahiranya, keberadaan pesantren sebagai Lembaga keislamaan yang sangat kental dengan karaktristik Indonesia ini memiliki nilai-nilai strategis dalam pengembangan masyarakat Indonesia.[50] Dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa peran kiai adalah konsekuensi dari sebuah kedudukan. Dengan kata lain, aktivitas yang dijalankan oleh seorang kiai yang diakibatkan dari kedudukan itu, maka hal itu disebut sebagai peranan.

[50] Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kemandirian Ekonomi

1. Pengertian Kemandirian

Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arti kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemandirian berawal dari kata mandiri yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an". Kemandirian adalah bentuk sikap terhadap obyek dimana individu memiliki independensi yang tidak terpengaruh terhadap orang lain.[51]

Istilah kemandirian menunjukan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli "kemandirian" menunjukan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhanya sendiri.[52]

Menurut Spances dan Koss seperti yang dikutip oleh Chabib Thoha[53], bahwa ciri- ciri kemandirian adalah sebagai berikut:

a. Mampu mengambil inisiatif.
b. Mampu mengatasi masalah.
c. Penuh ketekunan.
d. Memperoleh kepuasan dari hasil usahanya.

[51] Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam https://kbbi.site/, diakses pada 13 April 2017.
[52] Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), 131.
[53] M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Berkeinginan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.

Sedangkan menurut Sufyarman[54], kemandirian dapat dilihat dengan beberapa indikator antara lain:

a. Progresif dan ulet seperti tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapan-harapannya.
b. Berinisiatif, yang berarti mampu berfikir dan bertindak secara original, kreatif dan penuh inisiatif.
c. Mengendalikan dari dalam, adanya kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakannya serta kemampuan mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri.
d. Kemantapan diri, mencakup dalam aspek percaya pada diri sendiri.

2. Kemandirian Ekonomi

Langkah untuk Program pembangunan yang berbasis pemberdayaan ekonomi, paling tidak pesantren harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[55]

a. Kegiatan yang dilaksanakan harus terarah dan menguntungkan pesantren dan masyarakat sekitar terutama masyarakat yang lemah.
b. Pelaksanaannya dilakukan oleh pesantren dan masyarakat sendiri.
c. Sebab pesantren dan masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kurang berdaya, maka upaya pemberdayaan ekonomi pesantren menyangkut pula pengembangan kegiatan usaha bersama (cooperatif) dalam kelompok yang spesifik terkait dengan unit-unit usaha

[54] Sufyarman, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2003), 50-51.
[55] Mohammad Nadzir, "Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren", *Jurnal Economica*, Volume VI, Edisi 1, (Mei, 2015), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa diberdayakan kaum santri.

d. Menggerakkan partisipasi masyarakat sekitar untuk saling membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial. Dalam hal ini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju.

Menurut Priambodo sebagaimana yang dikutip oleh Djazimah, menyatakan secara konseptual kemandirian ekonomi memilki parameter atau ukuran ukuran tertentu diantaranya:[56]

a. Kemandirian ekonomi seseorang ditandai oleh adanya usaha atau pekerjaan yang dikelola secara ekonomis. Artinya bahwa usaha atau pekerjaan itu berorientasi pada keuntungan.
b. Kemandirian juga berangkat dari rasa percaya diri seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti usaha dagang, wirausaha dalam bentuk home industri, pengelolaan perusahaan dan lain sebagainya.
c. Kemandirian ekonomi ditandai oleh kegiatan ekonomis yang ditekuni dalam jangka waktu lama sehingga memungkinkan seseorang mempunyai kekuatan secara ekonomis untuk maju dan berkembang.
d. Kemandirian ekonomi juga ditandai oleh sikap berani dari seseorang atau kelompok orang untuk mengambil resiko dalam aktivitas ekonomis, misalnya bermimpi besar dan berusaha keras untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut, berani meminjam uang sebagai modal usaha dengan perhitungan rasional dan realistis, berani mengambil keputusan bersifat bisnis untuk memprediksi peluang-peluang yang ada.

[56] Siti Djazimah, "Potensi Ekonomi Pesantren", dalam Jurnal Penelitian Agama, Volume 13. (Jogjakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 2004), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kemandirian ekonomi juga dilihat dari sikap seseorang yang tidak terikat kebijakan secara ekonomis oleh orang lain.

Chapra menjelaskan bahwa dalam mengaktualisasi kemandirian ekonomi umat dengan sistem ekonomi Islam, dapat dilakukan melalui lima pilar utama, dimana kelima pilar ini merupakan prinsip dasar (kerangka acuan) untuk mensejahterakan umat itu sendiri. Kelima pilar utama tersebut adalah sebagai berikut:[57]

a. Pembangunan Faktor Manusia
b. Mengurangi Pemusatan Kekayaan
c. Restrukturisasi Ekonomi
d. Restrukturisasi Keuangan
e. Perencanaan Kebijakan Strategis

Adapun Bentuk-bentuk Kemandirian menurut Robert Havighurst sebagaimana di kutip Desmita, membedakan kemandirian atas empat bentuk kemandirian, yaitu:[58] Kemandirian Emosi merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain.

a. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada pihak atau orang lain.

---

[57] Umar Chapra, *Islam and Economic Development* (Pakistan: Internasional Insitute of Islamic Thought and Research Insitute, 1993), 62-100.
[58] Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (PT: Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kemandirian Intelektual

Kemandirian itelektual yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi

c. Kemandirian Sosial

Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain.6

Abdul Halim berpendapat bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiyai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.[59] Lebih lanjut Abdul Halim juga menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan dari pemerintah ataupun pinjaman dari pihak luar.[60] Dengan demikian dapat disamakan pula bahwa kemandirian pondok pesantren dapat diukur dari besar kecilnya sumber pemasukan dari unit-unit usaha yang dikelola sendiri daripada pemasukan dari pihak lain, misalnya bantuan pemerintah atau pinjaman dari pihak lain.

[59] Abdul Halim, *Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan,(*Yogyakarta: Upp Stim Ykpn*)*, 56.
[60] Ibid., 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id